

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERAN KEPEMIMPINAN SEKRETARIS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PUNCAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER

YOPIUS WONDA

8160302251081



**MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**Analisis Peran Kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam Implementasi
Kebijakan Kesetaraan Gender**

Nama : YOPIUS WONDA
NIM : 8160302251081
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen SDM

Menyetujui :

Pembimbing I : Dr. Kristian H.P. Lambe, MM., M.Si. (.....)

Pembimbing II: Dr. Ir. Corvis L. Rantererung, ST., MT. (.....)

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Manajemen

Prof . Dr. H. Baharuddin, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Peran Kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam Implementasi
Kebijakan Kesetaraan Gender**

Disusun dan Diajukan oleh:

YOPIUS WONDA

8160302251081

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tugas Akhir

Pada Tanggal, Desember 2025

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Kristian H.P. Lambe, MM., M.Si.

Dr. Ir. Corvis L. Rantererung, ST., MT.

**Direktur
Pascasarjana**

**Ketua
Program Studi**

Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yopius Wonda

NIM : 8160302251081

Program Studi : Magister Manajemen

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Indonesia Paulus

Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

“Analisis Peran Kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam Implementasi Kebijakan Kesenjangan Gender”

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya ilmiah orang lain.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, seluruh sumber informasi, data, teori, pendapat, maupun kutipan yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa karya ilmiah ini terbukti merupakan hasil plagiasi atau melanggar ketentuan akademik yang berlaku, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai peraturan akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puncak, _____ 2026

Yang Membuat Pernyataan,
Materai Rp10.000

YOPIUS WONDA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu peran kepemimpinan sekretaris dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah enam orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, dan staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sekretaris memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender melalui fungsi koordinasi organisasi, pengelolaan administrasi, komunikasi internal, pengawasan program, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi komitmen pimpinan, kerja sama internal organisasi, dukungan pemerintah daerah, serta regulasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan program. Sementara faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana operasional, serta masih adanya hambatan budaya masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender.

Strategi yang dinilai efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan adalah penerapan kepemimpinan partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan koordinasi internal organisasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengembangan kerja sama lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender sangat dipengaruhi oleh efektivitas kepemimpinan sekretaris sebagai bagian penting dalam manajemen organisasi publik.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Sekretaris, Implementasi Kebijakan, Kesetaraan Gender, Manajemen Sumber Daya Manusia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the leadership role of the secretary at the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak in the implementation of gender equality policy. The research focuses on three main aspects, namely the leadership role of the secretary in implementing gender equality policy, the supporting and inhibiting factors affecting policy implementation, and effective leadership strategies in optimizing the implementation of gender equality policy in Puncak Regency.

This study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of in-depth interviews, observation, and documentation. The research involved six informants selected through purposive sampling, consisting of the Head of Department, Head of Gender Mainstreaming Division, Head of Family Planning Division, Head of Women Protection Division, Head of Child Rights Fulfillment Section, and staff members at the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the secretary's leadership plays a strategic role in supporting the implementation of gender equality policy through organizational coordination, administrative management, internal communication, program supervision, and involvement in decision-making processes. Supporting factors in policy implementation include leadership commitment, internal organizational cooperation, local government support, and regulatory frameworks that support program implementation. Meanwhile, the main inhibiting factors include limited human resources, budget constraints, difficult geographical conditions, limited operational facilities, and cultural barriers within the community regarding gender equality concepts.

The strategies considered effective in optimizing policy implementation include the application of participatory leadership, improving human resource capacity through training, strengthening internal organizational coordination, increasing public socialization and awareness programs, and developing cross-sector collaboration. This study concludes that the success of gender equality policy implementation is strongly influenced by the effectiveness of the secretary's leadership as an essential part of public organizational management.

Keywords: Leadership, Secretary, Policy Implementation, Gender Equality, Human Resource Management.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Adapun judul Tugas Akhir ini adalah **“Analisis Peran Kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender.”**

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, motivasi, dan doa sehingga seluruh proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan penghargaan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih karunia, kesehatan, kekuatan, serta hikmat yang diberikan kepada penulis selama menjalani proses studi hingga penyelesaian tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana.
3. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis mengikuti proses pendidikan.
4. Dr. Kristian H.P. Lambe, M.M., M.Si., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, masukan, serta motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Dr. Ir. Corvis L. Rantererung, S.T., M.T., selaku Sekretaris Komisi Pembimbing yang telah memberikan perhatian, masukan akademik, serta bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian ini.
 6. Seluruh dosen Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan yang sangat bermanfaat selama masa studi.
 7. Kepala serta seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak yang telah memberikan izin penelitian, membantu proses pengumpulan data, serta memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.
 8. Kedua orang tua, keluarga besar, saudara-saudari, serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, semangat, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
 9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Manajemen angkatan 2025 Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis serta memberikan semangat selama proses studi.
 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini.
- Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Puncak, _____ 2026

Penulis,

YOPIUS WONDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Kepemimpinan	8
2.2 Peran Sekretaris dalam Organisasi	12
2.3 Konsep Kebijakan Publik	16
2.4 Konsep Kesenjangan Gender	20
2.5 Implementasi Kebijakan	24
2.6 Penelitian Terdahulu	28
2.7 Kerangka Pikir Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Informan Penelitian	36

3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data	39
3.6 Instrumen Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Puncak	42
4.2 Peran Kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46
4.3 Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender	50
4.4 Karakteristik dan Peran Informan	54
4.5 Hasil Penelitian (Analisis 6 Informan)	58
4.6 Pembahasan	67
4.7 Solusi dan Pengembangan	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88
Lampiran 1 Instrumen Wawancara	
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara	
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	
Lampiran 5 Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan nasional yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini mengamanatkan seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

Kabupaten Puncak sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua menghadapi tantangan kompleks dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender. Kondisi geografis yang sulit, keberagaman budaya, serta masih kuatnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Puncak masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Dalam konteks implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memegang peran strategis. Sebagai leading sector dalam pengarusutamaan gender, dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan di daerah responsif gender. Kepemimpinan Sekretaris Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kunci dalam menggerakkan seluruh aparat dan stakeholder terkait untuk berkontribusi dalam pencapaian kesetaraan gender.

Peran kepemimpinan dalam implementasi kebijakan publik telah banyak dikaji dalam literatur administrasi publik. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berkaitan dengan kemampuan manajerial semata, tetapi juga mencakup dimensi visioner, kemampuan membangun kolaborasi, serta kapasitas dalam mengelola perubahan organisasi. Dalam konteks implementasi kebijakan kesetaraan gender, kepemimpinan memiliki peran krusial dalam mengatasi resistensi budaya, membangun kesadaran gender, serta mengintegrasikan perspektif gender dalam sistem birokrasi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesetaraan gender menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas aparat, hingga resistensi budaya dan struktural. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji peran kepemimpinan dalam konteks implementasi kebijakan kesetaraan gender, khususnya di daerah dengan karakteristik khusus seperti Kabupaten Puncak, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap tersebut dan memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?
3. Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak.
3. Merumuskan strategi kepemimpinan yang efektif untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori kepemimpinan dalam konteks implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan kesetaraan gender. Hasil penelitian ini juga dapat

memperkaya literatur tentang administrasi publik di daerah dengan karakteristik khusus seperti Kabupaten Puncak, serta memberikan perspektif baru tentang peran kepemimpinan dalam mengatasi hambatan budaya dan struktural dalam implementasi kebijakan gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Puncak, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam mengembangkan strategi kepemimpinan yang efektif untuk mewujudkan kesetaraan gender.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu konsep sentral dalam studi organisasi dan administrasi publik. Menurut Yukl (2013), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini menekankan pada tiga aspek penting: pengaruh, fasilitasi, dan pencapaian tujuan bersama.

Northouse (2019) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses dimana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kepemimpinan dipandang sebagai proses interaktif yang melibatkan pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Bass dan Bass (2008) menambahkan bahwa kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan aktivitas anggota organisasi menuju pencapaian tujuan organisasi.

Dalam konteks administrasi publik, Terry (1960) mendefinisikan kepemimpinan sebagai aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ini relevan dengan konteks birokrasi pemerintahan dimana pemimpin harus mampu menggerakkan aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam melayani masyarakat.

2.1.2 Teori-Teori Kepemimpinan

Perkembangan teori kepemimpinan telah melalui berbagai fase evolusi. Berikut adalah beberapa teori kepemimpinan yang relevan dengan penelitian ini:

a. Teori Sifat (Trait Theory)

Teori sifat berfokus pada karakteristik pribadi pemimpin yang membedakan mereka dari non-pemimpin. Stogdill (1974) mengidentifikasi beberapa sifat yang konsisten ditemukan pada pemimpin efektif, antara lain: kecerdasan, kepercayaan diri, determinasi, integritas, dan sosiabilitas. Teori ini memberikan pemahaman tentang kualitas personal yang diperlukan seorang pemimpin, meskipun memiliki keterbatasan karena mengabaikan faktor situasional dan perilaku kepemimpinan.

b. Teori Perilaku (Behavioral Theory)

Teori perilaku mengalihkan fokus dari karakteristik pemimpin kepada perilaku yang ditunjukkan pemimpin. Blake dan Mouton (1964) mengembangkan Managerial Grid yang mengidentifikasi dua dimensi utama perilaku kepemimpinan: perhatian terhadap tugas (task-oriented) dan perhatian terhadap hubungan (relationship-oriented). Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan kedua orientasi ini.

c. Teori Kontingensi (Contingency Theory)

Perspektif Fiedler (1967) mengembangkan teori kontingensi yang menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dengan situasi. Teori ini mengakui bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin perlu menyesuaikan gayanya dengan karakteristik pengikut, sifat tugas, dan konteks organisasi.

d. Teori Kepemimpinan Transformasional

Menurut Burns (1978) dan Bass (1985) mengembangkan konsep kepemimpinan transformasional yang menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Bass mengidentifikasi empat komponen kepemimpinan transformasional, yaitu: idealized influence (pengaruh ideal), inspirational motivation (motivasi inspirasional), intellectual stimulation (stimulasi intelektual), dan individualized consideration (perhatian individual).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menekankan bahwa implementasi melibatkan berbagai aktor dan tindakan yang terkoordinasi.

Edwards III (1980) memandang implementasi kebijakan sebagai proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Dalam pandangan ini, implementasi bukanlah proses yang sederhana, melainkan proses yang kompleks yang melibatkan banyak variabel dan aktor. Pressman dan Wildavsky (1973) menekankan bahwa implementasi adalah evolusi, dimana kebijakan berkembang dan berubah selama proses pelaksanaannya.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

a. Model Edwards III

Edwards III (1980) mengembangkan model implementasi kebijakan yang mengidentifikasi empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

1. Komunikasi: Penyampaian informasi yang jelas tentang kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran.
2. Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan informasi yang memadai.
3. Disposisi: Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
4. Struktur Birokrasi: Karakteristik organisasi pelaksana, termasuk prosedur operasi standar dan fragmentasi.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model yang menekankan pada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor.

2.3 Kesenjangan Gender

2.3.1 Konsep Gender dan Kesenjangan Gender

Gender berbeda dengan jenis kelamin (sex). Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender merujuk pada

konstruksi sosial dan budaya tentang peran, perilaku, dan atribut yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan (Fakih, 2013). Konstruksi gender ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks budaya dan waktu.

Kesetaraan gender adalah kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mengakses, berpartisipasi, dan mengontrol sumber daya serta memperoleh manfaat dari pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan fondasi bagi masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

2.3.2 Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan. Menurut Economic and Social Council (ECOSOC) PBB tahun 1997, pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi bagi laki-laki dan perempuan dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan, atau program di semua bidang dan di semua tingkatan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

2.3.3 Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia

Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mendukung kesetaraan gender, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memasukkan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

2.4 Peran Kepemimpinan dalam Implementasi Kebijakan Gender

Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender. Rao dan Kelleher (2005) menekankan bahwa kepemimpinan yang responsif gender diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dan budaya dalam pencapaian kesetaraan gender. Pemimpin yang efektif dalam konteks gender adalah yang mampu memahami isu gender, berkomitmen terhadap kesetaraan, dan memiliki kapasitas untuk memobilisasi sumber daya dan membangun kolaborasi. Beberapa peran kunci kepemimpinan dalam implementasi kebijakan gender meliputi:

1. Peran Visionaris: Membangun visi bersama tentang kesetaraan gender dan mengkomunikasikannya kepada seluruh stakeholder.

2. Peran Fasilitator: Memfasilitasi proses pembelajaran dan perubahan mindset terkait isu gender.
3. Peran Koordinator: Mengkoordinasikan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan gender.
4. Peran Advokat: Mengadvokasi kebijakan dan program yang responsif gender.
5. Peran Pemberdaya: Memberdayakan aparatur dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencapaian kesetaraan gender.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori di atas, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang mengintegrasikan teori kepemimpinan transformasional Bass, model implementasi kebijakan Edwards III, dan konsep pengarusutamaan gender.

Dalam kerangka ini, kepemimpinan transformasional dengan komponen idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration, diasumsikan dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan gender dengan cara: (1) meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan, (2) mengoptimalkan mobilisasi dan alokasi sumber daya, (3) membentuk disposisi positif aparatur terhadap kebijakan gender, dan (4) memperbaiki struktur birokrasi agar lebih responsif gender.

BAB III

METODE ANALISIS

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam peran kepemimpinan dalam konteks implementasi kebijakan yang kompleks. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena kepemimpinan dalam implementasi kebijakan gender secara komprehensif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teoretis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan dinamika yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Puncak memiliki karakteristik unik sebagai daerah dengan tantangan khusus dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender, baik dari aspek geografis, sosial budaya, maupun kondisi pembangunan. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan yang mencakup

tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Pertimbangan utama dalam pemilihan informan adalah pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak. **Ada 7 orang sebagai Informan penelitian meliputi:**

1. Informan Kunci (Key Informan): Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak.
2. Informan Utama: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas PP dan PA, serta staf pelaksana yang terlibat langsung dalam program kesetaraan gender.
3. Informan Pendukung: Kepala BAPPEDA, Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat, akademisi, dan representatif dari organisasi masyarakat sipil yang peduli isu gender.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif. Data primer meliputi informasi tentang peran kepemimpinan, strategi implementasi kebijakan, hambatan dan tantangan, serta praktik-praktik terbaik dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi:

1. Peraturan dan kebijakan terkait kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah.
2. Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD).
3. Laporan kinerja Dinas PP dan PA.
4. Data statistik gender (IPG, IDG, dan indikator gender lainnya).
5. Hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang peran kepemimpinan dalam implementasi kebijakan gender. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga memungkinkan informan untuk memberikan jawaban secara bebas dan mendalam. Proses wawancara akan direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskripsikan untuk keperluan analisis.

3.5.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik kepemimpinan dan implementasi kebijakan gender di lapangan. Observasi mencakup pengamatan terhadap rapat koordinasi, pelaksanaan program, interaksi antara pemimpin dan

staf, serta dinamika organisasi. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan (field notes) yang kemudian dianalisis bersama dengan data dari wawancara dan dokumen.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, laporan kegiatan, profil daerah, dan dokumen lain yang mendukung analisis. Studi dokumentasi penting untuk memberikan konteks dan triangulasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan seleksi data, memfokuskan pada data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dan membuang data yang tidak relevan. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul sesuai dengan kerangka analisis.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, matriks, dan sejenisnya. Pada tahap ini, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman tentang pola-pola dan hubungan antar variabel.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis triangulasi:

3.7.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda, seperti membandingkan informasi dari Sekretaris Bidang dengan staf pelaksana, atau membandingkan informasi dari internal Dinas PP dan PA dengan pihak eksternal seperti tokoh masyarakat atau LSM.

3.7.2 Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dalam penelitian ini, data tentang peran kepemimpinan diperoleh tidak hanya dari wawancara, tetapi juga dari observasi langsung dan studi dokumentasi. Konsistensi data dari ketiga metode tersebut akan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

3.7.3 Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis dalam membahas permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan transformasional, model implementasi kebijakan Edwards III, dan konsep pengarusutamaan gender untuk menganalisis data secara komprehensif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Puncak







Kabupaten Puncak merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Papua Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten baru di wilayah Papua. Kabupaten ini memiliki ibu kota di Kota Ilaga dan dikenal sebagai wilayah pegunungan dengan karakteristik geografis yang cukup menantang dibandingkan daerah lain di Papua.

Secara geografis, Kabupaten Puncak berada pada kawasan pegunungan tengah Papua dengan kondisi topografi yang didominasi wilayah perbukitan dan pegunungan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan akses transportasi antarwilayah menjadi terbatas sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan sering menghadapi tantangan yang cukup besar. Sebagian besar wilayah distrik hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara ataupun jalur darat yang masih terbatas.

Dari sisi demografis, masyarakat Kabupaten Puncak terdiri atas komunitas masyarakat adat Papua yang masih mempertahankan budaya lokal yang kuat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Struktur sosial masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh nilai adat dan budaya tradisional yang berpengaruh terhadap pola hubungan sosial, pembagian peran keluarga, serta posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Puncak terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak. Salah satu isu pembangunan yang mendapat perhatian adalah upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pembangunan berbasis kesetaraan gender menjadi penting karena perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga maupun pembangunan sosial masyarakat. Namun implementasi kebijakan gender di daerah seperti Kabupaten Puncak menghadapi tantangan tersendiri karena adanya hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta pengaruh budaya lokal yang masih kuat. Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, pengarusutamaan gender, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen organisasi dan kepemimpinan aparatur pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan.

4.2 Peran Kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, khususnya organisasi publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam struktur organisasi pemerintahan, sekretaris memiliki posisi strategis karena berfungsi membantu pimpinan dalam mengelola administrasi organisasi, mengoordinasikan pelaksanaan program, mengawasi pelaksanaan kegiatan, serta memastikan seluruh unit kerja berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak, peran kepemimpinan sekretaris menjadi sangat penting karena organisasi ini menangani isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, serta implementasi kebijakan kesetaraan gender di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan sekretaris memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi koordinasi organisasi. Sekretaris berperan menghubungkan kepala dinas dengan seluruh bidang dan staf sehingga seluruh program dapat berjalan secara terintegrasi. Koordinasi yang baik memungkinkan setiap bidang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan program.

Kedua, fungsi pengelolaan administrasi organisasi. Sekretaris bertanggung jawab memastikan administrasi perencanaan program, pengelolaan dokumen, laporan kegiatan, penganggaran, serta pengelolaan sumber daya organisasi berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Ketiga, fungsi komunikasi internal organisasi. Sekretaris menjadi penghubung komunikasi antara pimpinan dan pegawai sehingga setiap kebijakan organisasi dapat dipahami secara jelas oleh seluruh unsur pelaksana. Komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan efektivitas kerja organisasi.

Keempat, fungsi pengawasan dan evaluasi program. Sekretaris memiliki tanggung jawab melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi capaian program, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kelima, fungsi pengambilan keputusan organisasi. Dalam berbagai kegiatan organisasi, sekretaris turut membantu pimpinan dalam proses perencanaan kebijakan, penentuan prioritas kegiatan, serta penyelesaian berbagai permasalahan internal organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan sekretaris memiliki hubungan yang sangat erat dengan efektivitas implementasi program kerja organisasi. Semakin baik kepemimpinan yang dijalankan maka semakin besar peluang keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

4.3 Implementasi Kebijakan Kesenjangan Gender

Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik, maupun pembangunan. Implementasi kebijakan kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Di Kabupaten Kabupaten Puncak, implementasi kebijakan kesetaraan gender dilaksanakan melalui berbagai program pemerintah daerah yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak.

Program-program tersebut meliputi kegiatan pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan dari kekerasan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, pembinaan keluarga, sosialisasi hak-hak perempuan, serta pelaksanaan program pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan daerah.

Implementasi kebijakan gender pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, partisipasi sosial, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat.

Namun berdasarkan kondisi daerah, implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya budaya tradisional masyarakat yang dalam beberapa kondisi menempatkan perempuan pada posisi terbatas dalam kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan proses

perubahan sosial berjalan secara bertahap dan membutuhkan pendekatan budaya yang lebih hati-hati.

Selain faktor budaya, keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga memengaruhi pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program yang direncanakan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Kondisi geografis Kabupaten Puncak yang cukup sulit dijangkau juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak distrik yang memiliki akses transportasi terbatas sehingga kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi program, dan pendampingan kelompok perempuan tidak dapat dilaksanakan secara rutin.

Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya menjalankan kebijakan kesetaraan gender melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah distrik, kelompok perempuan, serta berbagai unsur masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.

Keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender sangat bergantung pada efektivitas manajemen organisasi, kualitas kepemimpinan aparatur pemerintah, dukungan anggaran, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial budaya masyarakat lokal.

Dengan demikian implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak tidak hanya menjadi bagian dari program pemerintah, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya pembangunan daerah yang adil, inklusif, serta berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan anak secara berkelanjutan.

4.4 Karakteristik dan Peran Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan sumber utama data penelitian karena memberikan informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan program dan memahami implementasi kebijakan kesetaraan gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang yang terdiri dari unsur pimpinan, pejabat struktural, pejabat teknis, dan staf pelaksana. Pemilihan informan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran kepemimpinan sekretaris dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di lingkungan organisasi.

Adapun karakteristik informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Lama Bekerja	Peran dalam Penelitian
1	Juliana Murib, SKM	Kepala Dinas	20 Tahun 5 Bulan	Memberikan informasi terkait kebijakan organisasi, arah kepemimpinan, dan implementasi program secara umum
2	Salomina Yolemal, S.Pd	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender	19 Tahun 5 Bulan	Memberikan informasi terkait pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan koordinasi program
3	Mantruk Kogoya, S.Pd	Kepala Bidang Keluarga Berencana	32 Tahun 5 Bulan	Memberikan informasi mengenai dukungan program keluarga dan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat

No	Nama Informan	Jabatan	Lama Bekerja	Peran dalam Penelitian
4	Juli Sandadua Talebong	Staf Pelaksana	Data disesuaikan	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan teknis program dan pengalaman kerja lapangan
5	Isak Wakerkwa, S.A.B	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	5 Tahun 5 Bulan	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan perlindungan perempuan dan hambatan implementasi program
6	Nuis Smurib, S.Sos	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak	5 Tahun 5 Bulan	Memberikan informasi terkait program perlindungan anak, pelayanan sosial, dan implementasi kebijakan di tingkat teknis

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa seluruh informan memiliki latar belakang jabatan yang berbeda sehingga memberikan sudut pandang yang beragam terhadap penelitian yang dilakukan.

Informan pertama yaitu Juliana Murib, SKM selaku Kepala Dinas memiliki posisi sebagai pimpinan tertinggi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak. Sebagai kepala dinas, informan memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai kebijakan organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan program, serta arah pembangunan organisasi secara keseluruhan.

Informan kedua yaitu Salomina Yolemal, S.Pd menjabat sebagai Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender. Informan ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan program-program yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak, khususnya dalam kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan perempuan.

Informan ketiga yaitu Mantruk Kogoya, S.Pd menjabat sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana. Dengan pengalaman kerja selama 32 tahun 5 bulan, informan memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan program pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan keluarga.

Informan keempat yaitu Juli Sandadua Talebong sebagai staf pelaksana. Posisi ini memberikan perspektif teknis mengenai bagaimana kebijakan organisasi dilaksanakan di tingkat operasional, termasuk pengalaman langsung dalam menjalankan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Informan kelima yaitu Isak Wakerkwa, S.A.B menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Informan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan, pendampingan sosial, serta penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan di daerah.

Informan keenam yaitu Nuis Smurib, S.Sos menjabat sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak. Informan memiliki tugas pada pelaksanaan program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, serta kegiatan sosial yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan khususnya anak-anak.

Keberagaman karakteristik informan memberikan kekuatan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh berasal dari berbagai tingkatan jabatan dalam organisasi, mulai dari pimpinan, pejabat struktural, pejabat teknis, hingga staf pelaksana. Dengan demikian proses triangulasi data dapat dilakukan secara lebih

baik untuk memperoleh gambaran objektif mengenai peran kepemimpinan sekretaris dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, keenam informan dipilih karena dianggap memahami kondisi internal organisasi, mengetahui proses implementasi kebijakan, serta memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak.

Melalui informasi yang diperoleh dari keenam informan tersebut, penelitian ini dapat menganalisis secara mendalam hubungan antara kepemimpinan sekretaris dengan efektivitas implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Puncak.

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Informan

1	Nama Lengkap	Juliana Murib, SKM
2	Jabatan/Instansi	Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak
3	Lama Bekerja	20 Tahun 5 Bulan
4	Pendidikan Terakhir	Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
5	Tanggal Wawancara	29 Mei 2026

B. Instrumen Wawancara

1. Rumusan Masalah Pertama

Bagaimana peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Indikator: Peran Kepemimpinan

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tugas dan tanggung jawab Sekretaris pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Puncak?

Sekretaris memiliki tugas utama membantu pimpinan dalam mengoordinasikan administrasi, perencanaan program, pengelolaan sumber daya, serta memastikan seluruh kegiatan dinas berjalan sesuai tujuan organisasi.

2. Bagaimana Sekretaris bidang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mendukung pelaksanaan program kesetaraan gender?

Sekretaris menjalankan fungsi kepemimpinan melalui koordinasi internal, memberikan arahan kepada staf, memastikan program berjalan sesuai rencana, serta mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

3. Sejauh mana Sekretaris bidang berperan dalam proses perencanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Sekretaris sangat berperan karena ikut terlibat dalam penyusunan rencana kerja, penentuan prioritas program, pengalokasian anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan pimpinan dengan staf dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, pembagian tugas yang jelas, monitoring lapangan, serta komunikasi langsung antara pimpinan dengan seluruh pegawai.

5. Bagaimana Sekretaris bidang memberikan arahan kepada pegawai dalam melaksanakan program kerja terkait kesetaraan gender?

Arahan diberikan melalui briefing kerja, evaluasi program, pendampingan teknis, serta memastikan seluruh staf memahami tujuan program yang sedang dilaksanakan.

6. Bagaimana peran pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap program-program pemberdayaan perempuan?Pimpinan berperan penting dalam menentukan prioritas kegiatan, mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta memastikan program dapat memberikan manfaat nyata.

7. Apakah kepemimpinan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan gender di Kabupaten Puncak?

Secara umum sudah cukup efektif, walaupun masih terdapat beberapa kendala di lapangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi geografis wilayah.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan program kesetaraan gender?

Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala, laporan kegiatan, supervisi langsung, dan penilaian terhadap capaian program yang telah dijalankan.

2. Rumusan Masalah Kedua

Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Faktor pendukung utama adalah adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan pimpinan, kerja sama antarpegawai, serta adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program.

2. Apakah dukungan sumber daya manusia di instansi sudah memadai dalam menjalankan program-program kesetaraan gender?

Belum sepenuhnya memadai karena jumlah pegawai masih terbatas dan belum semua memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan program.

3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pemerintah daerah cukup mendukung melalui kebijakan, pengalokasian anggaran, serta memberikan ruang bagi dinas untuk melaksanakan program-program prioritas.

4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mendukung implementasi kebijakan tersebut?

Masih ada keterbatasan terutama fasilitas operasional dan akses transportasi ke beberapa distrik yang cukup sulit dijangkau.

5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan gender di lapangan?

Kendala yang sering dihadapi adalah kondisi geografis, keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat, serta akses komunikasi yang belum merata.

6. Apakah terdapat hambatan budaya atau kebiasaan masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan gender?

Ya, masih ada budaya masyarakat yang memandang bahwa perempuan belum memiliki ruang yang sama dalam pengambilan keputusan sehingga program sering membutuhkan pendekatan khusus.

7. Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Anggaran yang terbatas membuat beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal terutama kegiatan sosialisasi dan pendampingan masyarakat.

8. Apakah terdapat kendala koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tersebut?

Kadang terdapat kendala koordinasi karena perbedaan prioritas program antarorganisasi perangkat daerah sehingga perlu komunikasi yang lebih intensif.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program kesetaraan gender yang dijalankan pemerintah daerah?

Sebagian masyarakat memberikan respon positif, tetapi masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya kesetaraan gender sehingga perlu edukasi berkelanjutan.

3. Rumusan Masalah Ketiga

Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Strategi Kepemimpinan Efektif

1. Strategi apa yang selama ini digunakan pimpinan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender?*Strategi utama adalah memperkuat koordinasi internal, meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah, dan memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.*

2. Bagaimana pimpinan membangun komunikasi yang efektif dengan staf dalam menjalankan program kerja?

Komunikasi dibangun melalui rapat rutin, evaluasi bersama, keterbukaan informasi, dan pendekatan kekeluargaan agar staf merasa bertanggung jawab terhadap tugas.

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Kami mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan, workshop, kegiatan bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi sesuai bidang kerja.

4. Bagaimana strategi pimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program kesetaraan gender?

Melalui sosialisasi langsung ke kampung-kampung, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta pendekatan persuasif kepada keluarga dan komunitas.

5. Apakah dilakukan kerja sama dengan instansi lain dalam mendukung implementasi kebijakan gender? Jelaskan.

Ya, kami bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah distrik, serta organisasi masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan program.

6. Bagaimana strategi pimpinan dalam menghadapi hambatan budaya atau sosial yang menghambat kebijakan gender?

Pendekatan budaya sangat penting, sehingga kami melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat agar program dapat diterima dengan baik.

7. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarbagian atau antarinstansi?

Kami melakukan pertemuan koordinasi rutin, membangun komunikasi lintas sektor, dan menyusun pembagian tugas secara jelas.

8. Menurut Bapak/Ibu, model kepemimpinan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Model kepemimpinan partisipatif sangat efektif karena melibatkan seluruh pegawai dalam pengambilan keputusan dan membangun rasa tanggung jawab bersama.

9. Apa rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan lebih optimal di masa depan?

Perlu peningkatan anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan sosialisasi, serta dukungan pemerintah daerah yang lebih konsisten.

C. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan kesetaraan gender telah memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Puncak?

Saya melihat sudah ada dampak positif terutama meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak perempuan dan perlindungan anak, walaupun prosesnya masih bertahap.

2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan?

Harapan saya pelayanan semakin baik, program semakin menjangkau masyarakat sampai tingkat kampung, dan perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih setara.

3. Apakah ada masukan tambahan terkait kepemimpinan dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Ke depan dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak agar isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah.

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Informan

1	Nama Lengkap	Salomina Yolemal, S.Pd
2	Jabatan/Instansi	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak
3	Lama Bekerja	19 Tahun 5 Bulan
4	Pendidikan Terakhir	Sarjana Pendidikan (S.Pd)

5	Tanggal Wawancara	29 Mei 2026
---	----------------------	-------------

B. Instrumen Wawancara

1. Rumusan Masalah Pertama

Bagaimana peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Indikator: Peran Kepemimpinan

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tugas dan tanggung jawab Sekretaris pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Puncak?

Menurut saya, Sekretaris mempunyai peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi, koordinasi program, serta memastikan seluruh kegiatan dinas berjalan sesuai rencana kerja yang sudah ditetapkan.

2. Bagaimana Sekretaris bidang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mendukung pelaksanaan program kesetaraan gender?

Sekretaris menjalankan fungsi kepemimpinan dengan membangun koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, mengawasi pelaksanaan kegiatan, serta memastikan program kesetaraan gender berjalan sesuai target.

3. Sejauh mana Sekretaris bidang berperan dalam proses perencanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Sekretaris cukup berperan aktif karena terlibat dalam penyusunan program tahunan, pembahasan kegiatan prioritas, dan pengelolaan administrasi pendukung program.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan pimpinan dengan staf dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, evaluasi program secara rutin, pembagian tugas sesuai bidang masing-masing, serta komunikasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Bagaimana Sekretaris bidang memberikan arahan kepada pegawai dalam melaksanakan program kerja terkait kesetaraan gender?

Arahan biasanya diberikan melalui rapat internal, penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan.

6. Bagaimana peran pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap program-program pemberdayaan perempuan?

Pimpinan mempunyai peran utama dalam menentukan kebijakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah.

7. Apakah kepemimpinan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan gender di Kabupaten Puncak?

Saya menilai cukup efektif karena program-program yang dijalankan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan program kesetaraan gender?

Pengawasan dilakukan melalui monitoring kegiatan, laporan pertanggungjawaban, evaluasi hasil kerja, dan pemeriksaan capaian program secara berkala.

2. Rumusan Masalah Kedua

Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Faktor pendukung yang paling penting adalah dukungan pemerintah daerah, komitmen pimpinan, kerja sama internal pegawai, serta adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program.

2. Apakah dukungan sumber daya manusia di instansi sudah memadai dalam menjalankan program-program kesetaraan gender?

Saat ini masih perlu peningkatan karena jumlah pegawai terbatas dan belum semua memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengarusutamaan gender.

3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui kebijakan daerah, fasilitasi kegiatan, serta dukungan anggaran walaupun masih perlu ditingkatkan.

4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mendukung implementasi kebijakan tersebut?

Belum sepenuhnya mendukung, terutama fasilitas transportasi dan akses ke wilayah distrik yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan gender di lapangan?

Kendala utama adalah keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah, minimnya akses komunikasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu gender.

6. Apakah terdapat hambatan budaya atau kebiasaan masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan gender?

Masih ada budaya yang menempatkan perempuan pada posisi terbatas dalam kehidupan sosial sehingga membutuhkan pendekatan bertahap untuk memberikan pemahaman.

7. Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? Anggaran yang terbatas menyebabkan beberapa program sosialisasi dan pembinaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

8. Apakah terdapat kendala koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tersebut?

Terkadang ada kendala karena masing-masing instansi memiliki agenda kerja sendiri sehingga koordinasi perlu terus diperkuat.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program kesetaraan gender yang dijalankan pemerintah daerah?

Respon masyarakat cukup baik, tetapi masih banyak masyarakat yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya kesetaraan gender.

3. Rumusan Masalah Ketiga

Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Strategi Kepemimpinan Efektif

1. Strategi apa yang selama ini digunakan pimpinan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Strategi yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kegiatan sosialisasi, serta membangun kerja sama lintas sektor.

2. Bagaimana pimpinan membangun komunikasi yang efektif dengan staf dalam menjalankan program kerja?

Pimpinan selalu membangun komunikasi terbuka melalui rapat rutin, evaluasi bersama, dan memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan pendapat.

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pegawai diberikan kesempatan mengikuti pelatihan, workshop, serta kegiatan penguatan kapasitas yang berkaitan dengan isu gender dan perlindungan anak.

4. Bagaimana strategi pimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program kesetaraan gender?

Strateginya dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok perempuan dalam kegiatan sosialisasi.

5. Apakah dilakukan kerja sama dengan instansi lain dalam mendukung implementasi kebijakan gender? Jelaskan.

Ya, kami bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah distrik, dan organisasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program.

6. Bagaimana strategi pimpinan dalam menghadapi hambatan budaya atau sosial yang menghambat kebijakan gender?

Kami melakukan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat agar program dapat diterima secara bertahap oleh masyarakat.

7. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarbagian atau antarinstansi?

Dilakukan pertemuan rutin, pembagian tugas yang jelas, dan penguatan komunikasi lintas sektor agar program berjalan secara terpadu.

8. Menurut Bapak/Ibu, model kepemimpinan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Menurut saya model kepemimpinan partisipatif sangat efektif karena melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan dan membangun tanggung jawab bersama.

9. Apa rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan lebih optimal di masa depan?

Perlu peningkatan anggaran, penguatan sumber daya manusia, peningkatan edukasi masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah yang lebih berkelanjutan.

C. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan kesetaraan gender telah memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Puncak?

Saya melihat sudah ada perkembangan positif karena masyarakat mulai memahami pentingnya peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan?

Harapan saya pelayanan semakin baik, program semakin luas menjangkau distrik-distrik, dan hak perempuan serta anak semakin terlindungi.

3. Apakah ada masukan tambahan terkait kepemimpinan dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?*Perlu kerja sama semua pihak agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian penting dari pembangunan daerah ke depan.*

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Informan 3

1	Nama Lengkap	Mantruk Kogoya, S.Pd
2	Jabatan/Instansi	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak
3	Lama Bekerja	32 Tahun 5 Bulan

4	Pendidikan Terakhir	Sarjana Pendidikan (S.Pd)
5	Tanggal Wawancara	29 Mei 2026

B. Instrumen Wawancara

1. Rumusan Masalah Pertama

Bagaimana peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Indikator: Peran Kepemimpinan

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tugas dan tanggung jawab Sekretaris pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Puncak?

Sekretaris mempunyai tanggung jawab penting dalam membantu pimpinan mengatur administrasi dinas, mengelola program kerja, serta memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah.

2. Bagaimana Sekretaris bidang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mendukung pelaksanaan program kesetaraan gender?

Menurut saya fungsi kepemimpinan dijalankan melalui koordinasi dengan setiap bidang, memberikan arahan kepada pegawai, serta memastikan semua program berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

3. Sejauh mana Sekretaris bidang berperan dalam proses perencanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Perannya cukup besar karena sekretaris ikut terlibat dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran kegiatan, serta evaluasi program yang akan dilaksanakan.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan pimpinan dengan staf dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Koordinasi biasanya dilakukan melalui rapat internal dinas, pembagian tugas kepada masing-masing bidang, dan komunikasi langsung terkait pelaksanaan program di lapangan.

5. Bagaimana Sekretaris bidang memberikan arahan kepada pegawai dalam melaksanakan program kerja terkait kesetaraan gender?

Arahan diberikan melalui pembinaan rutin, penjelasan tugas secara langsung, serta memastikan setiap pegawai memahami tanggung jawab masing-masing.

6. Bagaimana peran pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap program-program pemberdayaan perempuan?

Pimpinan sangat menentukan arah program karena setiap keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

7. Apakah kepemimpinan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan gender di Kabupaten Puncak?

Saya melihat cukup efektif, walaupun dalam pelaksanaan di lapangan masih ada tantangan yang perlu dibenahi agar program berjalan lebih maksimal.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan program kesetaraan gender?

Pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi laporan kegiatan, melakukan monitoring lapangan, serta memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan.

2. Rumusan Masalah Kedua

Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Keberhasilan program dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, dukungan pemerintah daerah, kerja sama pegawai, serta adanya kebijakan yang mendukung pelaksanaan program.

2. Apakah dukungan sumber daya manusia di instansi sudah memadai dalam menjalankan program-program kesetaraan gender?

Masih belum maksimal karena jumlah tenaga kerja terbatas dan beberapa pegawai masih membutuhkan peningkatan kapasitas sesuai bidang tugas.

3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui kebijakan program dan anggaran, tetapi tentu masih perlu penguatan agar pelaksanaan lebih maksimal.

4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mendukung implementasi kebijakan tersebut?

Fasilitas kerja masih terbatas terutama sarana operasional untuk menjangkau distrik-distrik yang memiliki akses cukup sulit.

5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan gender di lapangan?

Kendala utama adalah keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah pegunungan, akses transportasi, serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih berbeda-beda.

6. Apakah terdapat hambatan budaya atau kebiasaan masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan gender? Ya, karena sebagian masyarakat masih memiliki pandangan tradisional mengenai peran perempuan sehingga program membutuhkan pendekatan yang lebih intensif.

7. Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Anggaran sangat berpengaruh karena menentukan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan terutama kegiatan sosialisasi dan pelayanan masyarakat.

8. Apakah terdapat kendala koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tersebut?

Kadang koordinasi belum berjalan maksimal karena setiap instansi memiliki prioritas kerja masing-masing sehingga perlu penguatan komunikasi.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program kesetaraan gender yang dijalankan pemerintah daerah?

Sebagian masyarakat menerima dengan baik, namun masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tujuan program tersebut.

3. Rumusan Masalah Ketiga

Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Strategi Kepemimpinan Efektif

1. Strategi apa yang selama ini digunakan pimpinan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Strategi yang digunakan adalah memperkuat kerja sama antarpegawai, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.

2. Bagaimana pimpinan membangun komunikasi yang efektif dengan staf dalam menjalankan program kerja?

Komunikasi dilakukan secara terbuka melalui rapat rutin, evaluasi kegiatan, dan memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan pendapat.

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pegawai diikutsertakan dalam pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan program.

4. Bagaimana strategi pimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program kesetaraan gender?

Dilakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan melibatkan tokoh masyarakat agar program lebih mudah diterima.

5. Apakah dilakukan kerja sama dengan instansi lain dalam mendukung implementasi kebijakan gender? Jelaskan.

Ya, kerja sama dilakukan dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, pemerintah distrik, serta organisasi masyarakat dalam mendukung kegiatan program.

6. Bagaimana strategi pimpinan dalam menghadapi hambatan budaya atau sosial yang menghambat kebijakan gender?

Pendekatan budaya sangat penting sehingga perlu melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

7. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarbagian atau antarinstansi?

Langkah yang dilakukan adalah memperbanyak forum koordinasi, menyusun agenda bersama, dan memperjelas pembagian tugas setiap instansi.

8. Menurut Bapak/Ibu, model kepemimpinan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Menurut saya kepemimpinan partisipatif dan komunikatif adalah model yang paling efektif karena semua pegawai merasa dilibatkan dalam pelaksanaan program.

9. Apa rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan lebih optimal di masa depan?

Perlu peningkatan anggaran, penguatan kapasitas pegawai, perluasan sosialisasi masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

C. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan kesetaraan gender telah memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Puncak?

Menurut saya sudah ada perubahan positif karena perempuan mulai lebih terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di masyarakat.

2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan?

Saya berharap pelayanan pemerintah semakin baik dan seluruh masyarakat sampai distrik terpencil dapat merasakan manfaat program yang dilaksanakan.

3. Apakah ada masukan tambahan terkait kepemimpinan dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Masukan saya adalah perlunya kerja sama lintas sektor yang lebih kuat agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Informan 4

1	Nama Lengkap	Juli Sandadua Talebong
2	Jabatan/Instansi	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak
3	Lama Bekerja	
4	Pendidikan Terakhir	
5	Tanggal Wawancara	29 Mei 2026

B. Instrumen Wawancara

1. Rumusan Masalah Pertama

Bagaimana peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Indikator: Peran Kepemimpinan

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tugas dan tanggung jawab Sekretaris pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Puncak?

Menurut saya, Sekretaris mempunyai tanggung jawab untuk mengatur administrasi, membantu pimpinan dalam mengelola kegiatan dinas, serta memastikan pekerjaan seluruh pegawai berjalan dengan baik.

2. Bagaimana Sekretaris bidang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mendukung pelaksanaan program kesetaraan gender?

Sekretaris menjalankan fungsi kepemimpinan dengan memberikan arahan kepada staf, mengatur pelaksanaan kegiatan, serta memastikan program kerja dapat berjalan sesuai perencanaan.

3. Sejauh mana Sekretaris bidang berperan dalam proses perencanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Sekretaris cukup berperan karena ikut dalam proses penyusunan program kerja dan membantu mengoordinasikan kebutuhan setiap bidang sebelum kegiatan dilaksanakan.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan pimpinan dengan staf dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender? Koordinasi biasanya dilakukan

melalui rapat kerja, pembagian tugas langsung kepada staf, serta komunikasi rutin mengenai perkembangan kegiatan.

5. Bagaimana Sekretaris bidang memberikan arahan kepada pegawai dalam melaksanakan program kerja terkait kesetaraan gender?

Arahan diberikan melalui penjelasan tugas sebelum kegiatan dimulai, memberikan petunjuk kerja, dan memastikan staf memahami tanggung jawab masing-masing.

6. Bagaimana peran pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap program-program pemberdayaan perempuan?

Pimpinan memiliki peran utama karena keputusan program ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebijakan dinas yang sedang dijalankan.

7. Apakah kepemimpinan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan gender di Kabupaten Puncak?

Menurut saya cukup membantu karena adanya arahan yang jelas membuat pekerjaan staf menjadi lebih terarah dalam menjalankan program.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan program kesetaraan gender?

Pengawasan dilakukan dengan memeriksa laporan kegiatan, melakukan evaluasi pekerjaan, dan melihat langsung hasil kegiatan di lapangan.

2. Rumusan Masalah Kedua

Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Menurut saya faktor pendukungnya adalah kerja sama antarpegawai, adanya dukungan pimpinan, serta program kerja yang sudah direncanakan dengan baik.

2. Apakah dukungan sumber daya manusia di instansi sudah memadai dalam menjalankan program-program kesetaraan gender?

Masih belum sepenuhnya memadai karena jumlah pegawai terbatas dan pekerjaan di lapangan cukup banyak terutama di wilayah distrik.

3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui program kerja dan anggaran, walaupun menurut saya masih perlu peningkatan agar kegiatan lebih maksimal.

4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mendukung implementasi kebijakan tersebut?

Masih ada keterbatasan terutama fasilitas kerja dan kendaraan operasional untuk kegiatan pelayanan masyarakat di lapangan.

5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan gender di lapangan?

Kendala yang sering dihadapi adalah akses transportasi, keterbatasan fasilitas, serta kondisi geografis yang membuat beberapa wilayah sulit dijangkau.

6. Apakah terdapat hambatan budaya atau kebiasaan masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan gender?

Ya, karena sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman tradisional mengenai peran perempuan sehingga sosialisasi membutuhkan waktu yang cukup panjang.

7. Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?*Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua program bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan terutama kegiatan sosialisasi dan pelayanan masyarakat.*

8. Apakah terdapat kendala koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tersebut?

Kadang ada kendala karena koordinasi belum berjalan maksimal sehingga perlu komunikasi yang lebih baik antara instansi terkait.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program kesetaraan gender yang dijalankan pemerintah daerah?

Sebagian masyarakat mendukung, tetapi masih ada yang belum memahami tujuan program sehingga perlu pendekatan yang lebih intensif.

3. Rumusan Masalah Ketiga

Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Strategi Kepemimpinan Efektif

1. Strategi apa yang selama ini digunakan pimpinan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Pimpinan biasanya menekankan kerja sama tim, komunikasi yang baik antarpegawai, dan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Bagaimana pimpinan membangun komunikasi yang efektif dengan staf dalam menjalankan program kerja?

Komunikasi dibangun melalui rapat, diskusi langsung, serta memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan kendala pekerjaan.

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pegawai diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas agar memahami tugas sesuai bidang kerja masing-masing.

4. Bagaimana strategi pimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program kesetaraan gender?

Melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat serta melibatkan tokoh masyarakat agar program dapat diterima lebih baik.

5. Apakah dilakukan kerja sama dengan instansi lain dalam mendukung implementasi kebijakan gender? Jelaskan.

Ya, ada kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah lain terutama untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat dan sosialisasi program.

6. Bagaimana strategi pimpinan dalam menghadapi hambatan budaya atau sosial yang menghambat kebijakan gender?

Biasanya dilakukan pendekatan secara persuasif dan melibatkan tokoh masyarakat agar masyarakat lebih mudah memahami program yang dijalankan.

7. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarbagian atau antarinstansi?

Dilakukan pertemuan bersama, pembagian tugas yang jelas, dan memperkuat komunikasi agar setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan.

8. Menurut Bapak/Ibu, model kepemimpinan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Menurut saya kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan mampu melibatkan semua pegawai sangat penting untuk keberhasilan program.

9. Apa rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan lebih optimal di masa depan?

Perlu peningkatan fasilitas kerja, tambahan anggaran, serta kegiatan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat di seluruh wilayah.

C. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan kesetaraan gender telah memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Puncak?

Saya melihat sudah ada perubahan positif karena masyarakat mulai memahami pentingnya perempuan ikut berperan dalam pembangunan keluarga dan lingkungan.

2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan?

Harapan saya pelayanan pemerintah semakin baik dan program dapat menjangkau masyarakat sampai wilayah yang paling jauh.

3. Apakah ada masukan tambahan terkait kepemimpinan dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Perlu kerja sama semua pihak dan dukungan yang lebih kuat agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan secara maksimal.

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Informan 5

1	Nama Lengkap	Isak Wakerkwa, S.A.B
2	Jabatan/Instansi	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak
3	Lama Bekerja	5 Tahun 5 Bulan
4	Pendidikan Terakhir	Sarjana Administrasi Bisnis (S.A.B)
5	Tanggal Wawancara	29 Mei 2026

B. Instrumen Wawancara

1. Rumusan Masalah Pertama

Bagaimana peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Indikator: Peran Kepemimpinan

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tugas dan tanggung jawab Sekretaris pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Puncak?

Sekretaris mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mendukung tata kelola organisasi, terutama mengatur administrasi, membantu koordinasi program, serta memastikan pelayanan organisasi berjalan secara teratur dan efektif.

2. Bagaimana Sekretaris bidang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mendukung pelaksanaan program kesetaraan gender?

Sekretaris menjalankan fungsi kepemimpinan dengan mengarahkan staf, memastikan setiap bidang bekerja sesuai tugas, serta mendukung program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan.

3. Sejauh mana Sekretaris bidang berperan dalam proses perencanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Perannya cukup besar karena sekretaris ikut dalam penyusunan agenda kerja, perencanaan kegiatan tahunan, serta membantu pengelolaan administrasi program yang akan dilaksanakan.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan pimpinan dengan staf dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Koordinasi dilakukan melalui rapat internal, penyampaian arahan langsung, evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta komunikasi berkelanjutan antarpegawai.

5. Bagaimana Sekretaris bidang memberikan arahan kepada pegawai dalam melaksanakan program kerja terkait kesetaraan gender?

Arahan biasanya diberikan sebelum kegiatan dilaksanakan, baik melalui rapat kerja maupun petunjuk teknis agar seluruh staf memahami tujuan dan tanggung jawab masing-masing.

6. Bagaimana peran pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap program-program pemberdayaan perempuan?

Pimpinan berperan dalam menentukan prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, dan kebijakan pemerintah daerah.

7. Apakah kepemimpinan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan gender di Kabupaten Puncak?

Saya menilai cukup efektif karena adanya koordinasi yang baik membantu pelaksanaan program menjadi lebih terarah meskipun masih ada beberapa hambatan teknis.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan program kesetaraan gender?

Pengawasan dilakukan melalui evaluasi laporan kegiatan, monitoring pelaksanaan program di lapangan, serta peninjauan terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan.

2. Rumusan Masalah Kedua

Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Faktor pendukung yang paling terlihat adalah dukungan pimpinan daerah, komitmen pegawai, kerja sama antarbidang, serta adanya program pemerintah yang mendukung isu pemberdayaan perempuan.

2. Apakah dukungan sumber daya manusia di instansi sudah memadai dalam menjalankan program-program kesetaraan gender?

Masih perlu ditingkatkan karena jumlah personel terbatas dan beberapa pegawai memerlukan peningkatan kapasitas dalam memahami isu perlindungan perempuan.

3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pemerintah daerah cukup memberikan dukungan melalui program dan kebijakan, walaupun dari sisi anggaran masih perlu diperkuat.

4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mendukung implementasi kebijakan tersebut? Belum sepenuhnya mendukung karena fasilitas operasional masih terbatas terutama untuk kegiatan pelayanan dan pendampingan di wilayah distrik.

5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan gender di lapangan?

Kendala utama yaitu kondisi geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, akses transportasi, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap isu perlindungan perempuan.

6. Apakah terdapat hambatan budaya atau kebiasaan masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan gender?

Masih ada hambatan budaya karena sebagian masyarakat masih memandang perempuan belum memiliki peran yang sama dalam kehidupan sosial sehingga edukasi perlu terus dilakukan.

7. Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Anggaran yang terbatas sangat berpengaruh karena beberapa kegiatan penting seperti sosialisasi, pendampingan korban, dan pelayanan masyarakat belum dapat berjalan maksimal.

8. Apakah terdapat kendala koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tersebut?

Koordinasi kadang menjadi kendala karena tidak semua instansi memiliki prioritas program yang sama sehingga dibutuhkan komunikasi yang lebih baik.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program kesetaraan gender yang dijalankan pemerintah daerah?

Respon masyarakat mulai positif, namun masih ada kelompok masyarakat yang belum memahami tujuan dari program kesetaraan gender secara menyeluruh.

3. Rumusan Masalah Ketiga

Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Strategi Kepemimpinan Efektif

1. Strategi apa yang selama ini digunakan pimpinan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Strategi utama yaitu memperkuat koordinasi organisasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan membangun kerja sama dengan instansi terkait.

2. Bagaimana pimpinan membangun komunikasi yang efektif dengan staf dalam menjalankan program kerja?

Pimpinan membangun komunikasi secara terbuka melalui rapat rutin, evaluasi bersama, serta memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan kendala yang dihadapi.

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pegawai diberikan kesempatan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, serta kegiatan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

4. Bagaimana strategi pimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program kesetaraan gender?

Dilakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok perempuan agar program dapat diterima lebih baik.

5. Apakah dilakukan kerja sama dengan instansi lain dalam mendukung implementasi kebijakan gender? Jelaskan.

Ya, ada kerja sama dengan dinas kesehatan, pendidikan, pemerintah distrik, aparat keamanan, dan organisasi sosial dalam mendukung pelaksanaan program.

6. Bagaimana strategi pimpinan dalam menghadapi hambatan budaya atau sosial yang menghambat kebijakan gender?

Strategi yang dilakukan adalah pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tetap menghormati budaya lokal sambil memberikan edukasi mengenai hak perempuan.

7. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarbagian atau antarinstansi?

Langkahnya adalah melakukan forum koordinasi rutin, menyusun agenda kerja bersama, dan memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak.

8. Menurut Bapak/Ibu, model kepemimpinan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Menurut saya model kepemimpinan yang partisipatif, terbuka, dan mampu membangun kerja sama tim adalah model yang paling efektif.

9. Apa rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan lebih optimal di masa depan?

Perlu penguatan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi masyarakat yang berkelanjutan, dan dukungan kebijakan daerah yang lebih kuat.

C. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan kesetaraan gender telah memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Puncak?

Saya melihat sudah ada perubahan perlahan, terutama meningkatnya kesadaran

masyarakat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan?

Saya berharap pelayanan semakin menjangkau masyarakat sampai distrik terpencil dan perlindungan terhadap perempuan dapat semakin diperkuat.

3. Apakah ada masukan tambahan terkait kepemimpinan dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Perlu keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat secara luas.

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Informan 6

1	Nama Lengkap	Nuis Smurib, S.Sos
2	Jabatan/Instansi	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak
3	Lama Bekerja	5 Tahun 5 Bulan
4	Pendidikan Terakhir	Sarjana Sosial (S.Sos)
5	Tanggal Wawancara	29 Mei 2026

B. Instrumen Wawancara

1. Rumusan Masalah Pertama

Bagaimana peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Indikator: Peran Kepemimpinan

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tugas dan tanggung jawab Sekretaris pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Puncak?

Sekretaris memiliki tugas penting dalam mengatur administrasi organisasi, mendukung pelaksanaan program kerja, serta membantu pimpinan dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dinas.

2. Bagaimana Sekretaris bidang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mendukung pelaksanaan program kesetaraan gender?

Sekretaris menjalankan fungsi kepemimpinan melalui pengaturan koordinasi kerja, pengawasan administrasi, pemberian arahan kepada pegawai, serta memastikan setiap program berjalan sesuai rencana.

3. Sejauh mana Sekretaris bidang berperan dalam proses perencanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Sekretaris terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan, membantu menyiapkan kebutuhan administrasi program, dan mengoordinasikan usulan kegiatan dari setiap bidang.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan pimpinan dengan staf dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender? Koordinasi biasanya dilakukan

melalui rapat kerja, diskusi internal, pembagian tugas secara langsung, serta komunikasi rutin terkait perkembangan kegiatan.

5. Bagaimana Sekretaris bidang memberikan arahan kepada pegawai dalam melaksanakan program kerja terkait kesetaraan gender?

Arahan diberikan secara langsung melalui briefing kerja, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.

6. Bagaimana peran pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap program-program pemberdayaan perempuan?

Pimpinan sangat menentukan arah program karena keputusan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

7. Apakah kepemimpinan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan gender di Kabupaten Puncak?

Menurut saya sudah cukup efektif karena adanya koordinasi dan pengawasan yang baik membantu program berjalan lebih terarah.

8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan program kesetaraan gender?

Pengawasan dilakukan melalui laporan kegiatan, evaluasi hasil kerja, monitoring lapangan, dan pemeriksaan terhadap capaian program secara berkala.

2. Rumusan Masalah Kedua

Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Faktor pendukung utama adalah adanya dukungan pimpinan, kerja sama pegawai, komitmen pemerintah daerah, dan adanya kebijakan yang mendukung pelaksanaan program.

2. Apakah dukungan sumber daya manusia di instansi sudah memadai dalam menjalankan program-program kesetaraan gender?

Masih perlu ditingkatkan karena jumlah pegawai terbatas dan belum semua memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan program.

3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pemerintah daerah memberikan dukungan melalui kebijakan dan program kerja, walaupun dukungan anggaran masih perlu diperkuat.

4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mendukung implementasi kebijakan tersebut?

Belum sepenuhnya mendukung karena masih ada keterbatasan fasilitas kerja dan sarana operasional untuk kegiatan lapangan.

5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan gender di lapangan?

Kendala yang paling sering dihadapi adalah akses wilayah yang sulit, keterbatasan anggaran, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.

6. Apakah terdapat hambatan budaya atau kebiasaan masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan gender?

Ya, beberapa masyarakat masih memegang budaya tradisional sehingga program tentang kesetaraan gender membutuhkan pendekatan yang bertahap.

7. Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Anggaran yang terbatas membuat kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

8. Apakah terdapat kendala koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tersebut?

Kadang terdapat kendala karena koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal sehingga perlu komunikasi yang lebih intensif.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program kesetaraan gender yang dijalankan pemerintah daerah?

Respon masyarakat cukup baik, tetapi masih banyak masyarakat yang perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai tujuan program tersebut.

3. Rumusan Masalah Ketiga

Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Strategi Kepemimpinan Efektif

1. Strategi apa yang selama ini digunakan pimpinan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender?

Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi internal, memperkuat kerja sama antarbidang, dan meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat.

2. Bagaimana pimpinan membangun komunikasi yang efektif dengan staf dalam menjalankan program kerja?

Komunikasi dilakukan melalui rapat rutin, diskusi bersama, evaluasi kegiatan, dan membangun hubungan kerja yang terbuka dengan seluruh pegawai.

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

Pegawai diberikan kesempatan mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan peningkatan kapasitas sesuai bidang kerja masing-masing.

4. Bagaimana strategi pimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program kesetaraan gender?

Dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan melibatkan tokoh masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya kesetaraan gender.

5. Apakah dilakukan kerja sama dengan instansi lain dalam mendukung implementasi kebijakan gender? Jelaskan.

Ya, kami bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah distrik, serta organisasi sosial yang mendukung program perlindungan perempuan dan anak.

6. Bagaimana strategi pimpinan dalam menghadapi hambatan budaya atau sosial yang menghambat kebijakan gender?

Pendekatan yang dilakukan adalah menghormati budaya lokal sambil memberikan edukasi secara perlahan agar masyarakat menerima program dengan baik.

7. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarbagian atau antarinstansi?

Dilakukan pertemuan koordinasi rutin, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan komunikasi antarinstansi terkait.

8. Menurut Bapak/Ibu, model kepemimpinan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Menurut saya kepemimpinan partisipatif dan komunikatif sangat efektif karena melibatkan seluruh pegawai dalam menjalankan program kerja.

9. Apa rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan lebih optimal di masa depan?

Perlu peningkatan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan sosialisasi masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah yang lebih kuat.

C. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan kesetaraan gender telah memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Puncak?

Saya melihat sudah ada perubahan positif terutama meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak perempuan dan hak anak di masyarakat.

2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan?

Harapan saya pelayanan semakin baik, program semakin menjangkau seluruh distrik, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak semakin diperkuat.

3. Apakah ada masukan tambahan terkait kepemimpinan dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Perlu dukungan semua pihak agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian penting dari pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4.5 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik wawancara mendalam terhadap enam informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap implementasi kebijakan kesetaraan gender di lingkungan organisasi.

Adapun informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, dan Staf pelaksana. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan tiga fokus penelitian sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan.

4.5.1 Peran Kepemimpinan Sekretaris dalam Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam informan, diperoleh gambaran bahwa peran kepemimpinan sekretaris memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Puncak.

Informan pertama, Juliana Murib selaku Kepala Dinas menjelaskan bahwa sekretaris memiliki fungsi utama dalam membantu pimpinan melalui koordinasi administrasi, penyusunan program kerja, pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai arah kebijakan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sekretaris bukan hanya berfungsi administratif tetapi juga memiliki peran manajerial dalam mendukung implementasi kebijakan gender.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Salomina Yolemal sebagai Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender yang menjelaskan bahwa sekretaris memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan antarbidang, membangun komunikasi internal organisasi, dan memastikan seluruh kegiatan berjalan secara sistematis.

Selanjutnya Mantruk Kogoya selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana menyatakan bahwa kepemimpinan sekretaris sangat membantu efektivitas kerja organisasi karena setiap program dapat berjalan dengan pembagian tugas yang jelas dan adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf.

Isak Wakerkwa sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan menambahkan bahwa sekretaris memiliki peran dalam pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi organisasi, serta pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilaksanakan kepada masyarakat.

Nuis Smurib sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak menegaskan bahwa sekretaris menjadi penghubung utama antara pimpinan dengan seluruh pegawai sehingga proses komunikasi organisasi menjadi lebih efektif.

Sementara Juli Sandadua Talebong selaku staf menyampaikan bahwa kepemimpinan sekretaris sangat membantu pegawai karena adanya arahan kerja yang jelas sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran kepemimpinan sekretaris memiliki kontribusi penting dalam pengorganisasian, koordinasi, pengawasan, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender.

4.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Seluruh informan menyatakan bahwa faktor pendukung utama berasal dari komitmen pimpinan organisasi, dukungan pemerintah daerah, kerja sama internal pegawai, serta adanya regulasi pemerintah yang memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Juliana Murib menjelaskan bahwa dukungan pemerintah daerah memberikan kontribusi penting terhadap keberlanjutan program meskipun dari sisi anggaran masih belum optimal.

Salomina Yolemal menjelaskan bahwa faktor pendukung lainnya adalah adanya kerja sama antarpegawai serta dukungan masyarakat yang mulai memahami pentingnya peran perempuan dalam pembangunan.

Namun demikian penelitian menemukan sejumlah faktor penghambat. Mantruk Kogoya menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kondisi geografis Kabupaten Puncak sebagai hambatan utama dalam pelaksanaan program.

Isak Wakerkwa menambahkan bahwa hambatan budaya masyarakat masih menjadi tantangan karena sebagian masyarakat masih memandang perempuan berada dalam posisi terbatas pada ruang domestik.

Nuis Smurib menjelaskan bahwa belum meratanya akses transportasi dan komunikasi menyebabkan pelaksanaan program di distrik-distrik belum berjalan maksimal.

Juli Sandadua Talebong sebagai staf menyampaikan bahwa keterbatasan fasilitas kerja dan kendaraan operasional menjadi kendala yang cukup memengaruhi pelayanan lapangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan gender dipengaruhi oleh faktor internal organisasi dan faktor eksternal berupa kondisi sosial budaya, geografis, serta dukungan anggaran pemerintah daerah.

4.5.3 Strategi Kepemimpinan dalam Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menekankan pentingnya strategi kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan gender di Kabupaten Puncak.

Strategi pertama adalah penguatan koordinasi internal organisasi. Seluruh informan menyatakan bahwa komunikasi dan kerja sama antarpegawai menjadi fondasi utama keberhasilan program.

Strategi kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.

Strategi ketiga adalah memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui pendekatan langsung dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah distrik.

Strategi keempat adalah membangun kerja sama lintas sektor dengan instansi lain seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, organisasi sosial, dan pemerintah distrik.

Strategi kelima adalah menerapkan model kepemimpinan partisipatif yang memberikan ruang kepada pegawai untuk terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan kesetaraan gender sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan sekretaris sebagai aktor manajerial yang menghubungkan pimpinan organisasi dengan seluruh unsur pelaksana.

4.6 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak memiliki peranan yang sangat strategis dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender. Dalam perspektif manajemen organisasi publik, seorang sekretaris tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi tetapi juga berperan sebagai koordinator,

penghubung komunikasi organisasi, pengawas internal, dan bagian dari proses pengambilan keputusan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan menempatkan sekretaris sebagai aktor penting dalam proses pengorganisasian program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kondisi ini sejalan dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry yang menjelaskan bahwa fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks penelitian ini sekretaris menjalankan seluruh fungsi tersebut melalui koordinasi kegiatan organisasi.

Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sekretaris mampu menciptakan efektivitas kerja organisasi melalui komunikasi internal yang baik. Temuan ini memperkuat teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun komunikasi, memberikan motivasi, dan mengarahkan anggota organisasi menuju tujuan bersama.

Pada aspek faktor pendukung, penelitian menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah, kerja sama internal pegawai, regulasi kebijakan, serta dukungan pimpinan organisasi merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan gender. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan tetapi juga dukungan kelembagaan secara menyeluruh.

Namun penelitian juga menemukan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan. Hambatan utama yang muncul adalah keterbatasan sumber daya

manusia, keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah Kabupaten Puncak yang sulit dijangkau, serta masih kuatnya budaya masyarakat tradisional yang memengaruhi persepsi terhadap peran perempuan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini terlihat bahwa faktor sumber daya dan komunikasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program kesetaraan gender.

Dari sisi strategi kepemimpinan, penelitian menunjukkan bahwa model kepemimpinan partisipatif merupakan pendekatan yang paling efektif diterapkan. Kepemimpinan partisipatif memungkinkan seluruh pegawai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepemimpinan partisipatif yang dikemukakan oleh Rensis Likert yang menekankan pentingnya keterlibatan anggota organisasi dalam proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas kerja.

Selain itu strategi peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan workshop juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan. Organisasi pemerintah daerah yang menangani isu pemberdayaan perempuan membutuhkan sumber daya manusia yang memahami isu gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan pendekatan sosial masyarakat.

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi strategi yang sangat penting karena implementasi kebijakan gender tidak dapat berjalan efektif apabila masyarakat belum memahami tujuan kebijakan tersebut. Di Kabupaten Kabupaten Puncak, pendekatan budaya menjadi bagian penting karena masyarakat masih memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari kualitas kepemimpinan organisasi. Sekretaris sebagai bagian penting dalam struktur organisasi pemerintah memiliki fungsi strategis dalam memastikan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program kerja yang berjalan efektif.

Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di lingkungan pemerintah daerah membutuhkan kepemimpinan yang efektif, dukungan sumber daya yang memadai, koordinasi organisasi yang baik, partisipasi masyarakat, serta strategi manajerial yang adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat lokal.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa semakin baik kualitas kepemimpinan sekretaris dalam menjalankan fungsi organisasi, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan inklusif.

4.7 Solusi dan Pengembangan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kepemimpinan sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender, ditemukan berbagai faktor yang

mendukung maupun menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah solusi yang tepat serta strategi pengembangan organisasi agar implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4.7.1 Solusi terhadap Permasalahan Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi pegawai. Untuk mengatasi hal tersebut, organisasi perlu melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendidikan teknis, workshop, dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengarusutamaan gender, serta manajemen pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting karena keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam memahami tugas dan menjalankan fungsi organisasi secara profesional.

2. Penguatan Koordinasi Internal Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi internal organisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Oleh sebab itu diperlukan penguatan komunikasi kerja antara pimpinan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, dan staf pelaksana agar seluruh program dapat berjalan secara terintegrasi.

Penguatan koordinasi dapat dilakukan melalui rapat evaluasi rutin, pembagian tugas yang jelas, sistem pelaporan berkala, serta peningkatan disiplin organisasi agar proses implementasi kebijakan berjalan lebih efektif.

3. Optimalisasi Dukungan Anggaran Program

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender. Banyak program pelayanan masyarakat, sosialisasi, dan pendampingan perempuan maupun anak belum berjalan maksimal karena keterbatasan pendanaan.

Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu meningkatkan prioritas pengalokasian anggaran terhadap program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu organisasi juga dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih efisien berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.

4. Penguatan Sosialisasi kepada Masyarakat

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isu kesetaraan gender menjadi tantangan yang cukup besar dalam implementasi kebijakan. Sebagian masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya tradisional yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan sosial.

Solusi yang diperlukan adalah memperluas kegiatan sosialisasi melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemerintah distrik agar masyarakat memahami pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan sosial.

5. Pengembangan Kerja Sama Lintas Sektor

Implementasi kebijakan gender tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu organisasi pemerintah. Oleh sebab itu diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi pemerintah seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah distrik, organisasi sosial, serta lembaga masyarakat.

Melalui kerja sama lintas sektor, pelaksanaan program akan menjadi lebih efektif karena setiap instansi dapat memberikan kontribusi sesuai bidang tugas masing-masing.

4.7.2 Pengembangan Strategi Organisasi ke Depan

1. Pengembangan Model Kepemimpinan Partisipatif

Berdasarkan hasil penelitian, model kepemimpinan partisipatif merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender. Oleh karena itu ke depan organisasi perlu mengembangkan pola kepemimpinan yang lebih terbuka, komunikatif, dan melibatkan seluruh pegawai dalam proses pengambilan keputusan.

Kepemimpinan partisipatif akan meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap keberhasilan program organisasi.

2. Digitalisasi Sistem Administrasi dan Pelaporan

Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, diperlukan pengembangan sistem administrasi yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pelaporan digital akan membantu proses pengawasan program, pengelolaan data kegiatan, dokumentasi pelayanan masyarakat, dan monitoring capaian organisasi secara lebih efisien.

Pengembangan digitalisasi administrasi juga akan mempercepat proses koordinasi internal organisasi terutama pada daerah yang memiliki tantangan geografis seperti Kabupaten Puncak.

3. Pengembangan Program Berbasis Kebutuhan Lokal

Kabupaten Kabupaten Puncak memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda dengan daerah lain sehingga program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat.

Pengembangan program berbasis kebutuhan lokal menjadi penting agar kebijakan pemerintah lebih mudah diterima masyarakat serta dapat menjawab permasalahan yang nyata terjadi di lapangan.

4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Program

Ke depan organisasi perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program yang dijalankan. Monitoring secara berkala memungkinkan organisasi mengetahui tingkat keberhasilan program, hambatan lapangan, serta melakukan perbaikan terhadap program yang belum berjalan optimal.

Evaluasi program juga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Oleh karena itu organisasi perlu mengembangkan strategi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui forum komunikasi masyarakat, kegiatan pemberdayaan komunitas perempuan, pembinaan keluarga, pendidikan sosial, serta pendampingan kelompok rentan di tingkat distrik maupun kampung.

Secara keseluruhan, solusi dan pengembangan yang dirumuskan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kepemimpinan, penguatan kapasitas organisasi, dukungan sumber daya yang memadai, serta keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak.

Melalui penerapan solusi yang tepat dan strategi pengembangan organisasi yang berkelanjutan, diharapkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Peran Kepemimpinan Sekretaris dalam Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak, yang dilakukan melalui wawancara terhadap enam informan serta analisis data secara kualitatif, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepemimpinan Sekretaris dalam Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sekretaris memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender di lingkungan organisasi. Sekretaris berfungsi sebagai koordinator administrasi, penghubung komunikasi organisasi, pengawas internal, fasilitator pelaksanaan program, serta bagian dari proses pengambilan keputusan organisasi. Kepemimpinan yang dijalankan secara efektif mampu menciptakan koordinasi kerja yang baik sehingga pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan lebih terarah sesuai tujuan organisasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

Penelitian menemukan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender meliputi adanya komitmen pimpinan organisasi, dukungan pemerintah daerah, kerja sama internal antarpegawai, serta regulasi kebijakan yang

mendukung pelaksanaan program. Sementara itu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran program, kondisi geografis wilayah Kabupaten Puncak yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana operasional, serta masih adanya hambatan budaya masyarakat yang memengaruhi pemahaman terhadap pentingnya kesetaraan gender.

3. Strategi Kepemimpinan yang Efektif dalam Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender

Strategi kepemimpinan yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender adalah penerapan model kepemimpinan partisipatif, penguatan koordinasi internal organisasi, peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, perluasan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengembangan kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi pemerintah dan unsur masyarakat. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan di daerah.

Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan sekretaris sebagai bagian penting dalam sistem manajemen organisasi publik. Semakin baik fungsi kepemimpinan yang dijalankan maka semakin besar peluang keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Puncak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Puncak perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan teknis, workshop, dan pengembangan kompetensi pegawai khususnya yang berkaitan dengan isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender agar kualitas pelayanan organisasi semakin meningkat.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Puncak diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar melalui peningkatan alokasi anggaran terhadap program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal sampai pada tingkat distrik dan kampung.

3. Bagi Pimpinan Organisasi

Pimpinan organisasi perlu terus memperkuat pola kepemimpinan partisipatif dengan membangun komunikasi yang terbuka, meningkatkan koordinasi antarbidang, memperjelas pembagian tugas pegawai, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program yang dijalankan agar efektivitas organisasi semakin meningkat.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan partisipasi dalam mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan,

perlindungan perempuan, dan perlindungan anak. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial di daerah.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis kepemimpinan sekretaris dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di satu organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan fokus yang lebih luas seperti efektivitas kebijakan gender di tingkat distrik, analisis partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, maupun evaluasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah otonomi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M., & Bass, R. (2008). *The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications* (4th ed.). New York: Free Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (2000). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285278/inpres-no-9-tahun-2000>
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126342/permendagri-no-15-tahun-2008>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *Gender Equality Strategy 2018-2021*. New York: UNDP.
- United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). (1997). *Report of the Economic and Social Council for 1997*. New York: United Nations.

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Informan

.....
ngan

.....
engkap

.....
/Instansi

.....
ekerja

.....
ikan Terakhir

.....
l Wawancara

B. Instrumen Wawancara

1. Rumusan Masalah Pertama

**Bagaimana peran kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Puncak dalam implementasi kebijakan
kesetaraan gender?**

Indikator: Peran Kepemimpinan

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami tugas dan tanggung jawab Sekretaris pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Puncak?
2. Bagaimana Sekretaris bidang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mendukung pelaksanaan program kesetaraan gender?
3. Sejauh mana Sekretaris bidang berperan dalam proses perencanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan pimpinan dengan staf dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender?
5. Bagaimana Sekretaris bidang memberikan arahan kepada pegawai dalam melaksanakan program kerja terkait kesetaraan gender?
6. Bagaimana peran pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap program-program pemberdayaan perempuan?
7. Apakah kepemimpinan yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan gender di Kabupaten Puncak?
8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan program kesetaraan gender?

2. Rumusan Masalah Kedua

Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Faktor Pendukung dan Penghambat

Pertanyaan Wawancara

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?
2. Apakah dukungan sumber daya manusia di instansi sudah memadai dalam menjalankan program-program kesetaraan gender?
3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mendukung implementasi kebijakan tersebut?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program kesetaraan gender di lapangan?
6. Apakah terdapat hambatan budaya atau kebiasaan masyarakat yang memengaruhi implementasi kebijakan gender?
7. Bagaimana keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
8. Apakah terdapat kendala koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program tersebut?
9. Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program kesetaraan gender yang dijalankan pemerintah daerah?

3. Rumusan Masalah Ketiga

Bagaimana strategi kepemimpinan yang efektif dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

Indikator: Strategi Kepemimpinan Efektif

Pertanyaan Wawancara

1. Strategi apa yang selama ini digunakan pimpinan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan kesetaraan gender?
2. Bagaimana pimpinan membangun komunikasi yang efektif dengan staf dalam menjalankan program kerja?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

4. Bagaimana strategi pimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program kesetaraan gender?
5. Apakah dilakukan kerja sama dengan instansi lain dalam mendukung implementasi kebijakan gender? Jelaskan.
6. Bagaimana strategi pimpinan dalam menghadapi hambatan budaya atau sosial yang menghambat kebijakan gender?
7. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarbagian atau antarinstitusi?
8. Menurut Bapak/Ibu, model kepemimpinan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?
9. Apa rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat berjalan lebih optimal di masa depan?

C. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan kesetaraan gender telah memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Puncak?
2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke depan?
3. Apakah ada masukan tambahan terkait kepemimpinan dan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Puncak?

DOKUMENTASI







